

ANALISIS PENGUNGKAPAN TATA KELOLA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Cahyo Luthfi Adiono
Mahfud Sholihin

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Humaniora 1 Bulaksumur-Yogyakarta, 55281, Indonesia.

Abstract

This research aimed to analyze the disclosure level of corporate governance on annual report of BUS (Syariah Commercial Banks) in Indonesia in 2010-2012 with indicator stated in Indonesia Bank Rules number 11/33/PBI/2009. Besides, this research also analyzed the growth of the disclosure level. To reach the aim, this research used content analysis method. The result of research showed that Syariah Mandiri Bank, BCA Syariah Bank, and Muamalat Bank had the highest disclosure value while Bukopin Syariah Bank had the highest growth average. However, only four BUS had disclosure value above 70 percent and four BUS had growth rank above 5 percent per year. It showed that during 3 year-period the disclosure level of BUS corporate governance in annual report was not high and it had not had a meaningful growth.

Key words: *content analysis, corporate governance, disclosure, syariah bank*

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, tata kelola perusahaan (*corporate governance*) menjadi pusat perhatian berbagai pihak baik regulator, investor, maupun akademisi. Tata kelola yang baik dianggap dapat mengurangi konflik kepentingan diantara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat menimbulkan terjadinya penipuan dan penyalahgunaan. Berdasarkan survei oleh McKinsey & Company (2002), banyak investor menganggap bahwa tata kelola setidaknya sama pentingnya dengan indikator finansial sebuah perusahaan.

Tata kelola yang baik juga diperlukan pada industri perbankan syariah, bahkan dianggap lebih

penting dibandingkan industri perbankan konvensional karena depositor menghadapi risiko yang lebih tinggi pada kontrak bagi hasil (Satkunasingham & Shanmugam, 2004 dan Chapra & Ahmed, 2002). Perbankan syariah juga memiliki prinsip tata kelola yang berbeda. Hamid *et al.* (2011) menyatakan bahwa model tata kelola Islam memiliki perbedaan dibanding model barat (Anglo-Saxon). Menurut Widiyanti *et al.* (2011), Islam memiliki prinsip tata kelola yang berbeda dibandingkan prinsip yang dikeluarkan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*).

Korespondensi dengan Penulis:

Cahyo Luthfi Adiono: Telp. +62 274 548 510

E-mail: yupi.icc@gmail.com; mahfud@ugm.ac.id

Analisis Pengungkapan Tata Kelola Bank Syariah di Indonesia

Cahyo Luthfi Adiono & Mahfud Sholihin

Di Indonesia, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Menurut Bank Indonesia (2012), pada Oktober 2012 total aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) meningkat pesat, yaitu kurang lebih 37% dari tahun sebelumnya. Bahkan, pada Oktober 2011, peningkatan aset mencapai 48,1%, atau yang tertinggi dalam kurun waktu 2009-2011 (Bank Indonesia, 2011). Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana. Bank Indonesia (2012) juga menyebutkan bahwa jumlah kantor jaringan BUS dan UUS meningkat. Perbaikan pun terjadi pada tingkat rentabilitas dan rasio kinerja. Bank Indonesia memperkirakan pada 2013 pertumbuhan perbankan syariah tetap berada pada kisaran 36%-58%.

Menyadari hal ini, Bank Indonesia (BI) pun mengeluarkan peraturan pelaksanaan tata kelola syariah yang berbeda. Pada 7 Desember 2009, BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 yang mengatur pelaksanaan *good governance* bagi BUS dan UUS. Peraturan ini terpisah dari peraturan pelaksanaan bagi Bank Umum Konvensional (BUK) pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian direvisi dalam PBI Nomor 8/14/PBI/2006. Di dalam PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tersebut diatur persyaratan minimum *Good Corporate Governance* (GCG), baik dalam dewan komisaris, direksi, maupun dewan pengawas syariah. Diatur pula aspek transparansi pemegang saham dan pelaporan pelaksanaan GCG.

Walau terdapat perhatian yang cukup tinggi dari investor dan aktivis terhadap perlunya pengungkapan tata kelola, tidak ditemukan banyak studi komprehensif tentang reaksi dan praktik pengungkapan tata kelola terhadap regulasi (Holder-Webb *et al.*, 2008). Di samping itu, tidak banyak penulisan tentang struktur tata kelola pada perbankan syariah dan institusi syariah lainnya (Sulaiman dalam Hamid, 2011). Penelitian Paino *et al.* (2011) tentang pelaporan bank syariah di Ma-

laysia, menunjukkan kepatuhan pengungkapan tergolong tinggi. Untuk di Indonesia, penelitian Darmadi (2011) menunjukkan bahwa pada tahun 2010 Bank Syariah Mandiri dan Muamalat memiliki pelaporan tata kelola yang lebih baik dari bank-bank umum syariah lainnya.

Berbeda dengan penelitian Darmadi (2011), penelitian ini akan mengkaji kesesuaian pelaporan tata kelola 9 bank umum syariah di Indonesia dengan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 selama 3 periode, yaitu 2010 hingga 2012, menggunakan metode *content analysis*. Dengan demikian, penelitian yang menguji kualitas pengungkapan dalam laporan tahunan ini berbeda dengan penelitian Darmadi (2011) yang meneliti tujuh bank menggunakan tujuh indikator tata kelola, yaitu *corporate governance disclosure index* (CGDI) yang dibentuk berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, seperti Chapra & Ahmed (2002), Haniffa & Hudaib (2007), dan Safieddine (2009). Indikator yang diambil dari PBI Nomor 11/33/PBI/2009 ini lebih baik karena lebih spesifik dengan lingkungan perbankan di Indonesia dibanding CGDI yang lebih didasarkan pada bank-bank di Timur Tengah. Selain itu, indikator ini mampu menggambarkan tingkat informasi yang diharapkan oleh regulator. Penambahan jumlah periode dan sampel bank pun diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian. Penelitian ini berfokus pada praktik pengungkapan tata kelola bank syariah, sehingga tergolong unik mengingat sebagian besar literatur berfokus pada hubungan tingkat tata kelola dengan performa perusahaan dan perilaku eksekutif perusahaan (Larcker *et al.*, 2007 dan MacAulay *et al.*, 2009).

METODE

Dalam melakukan analisis, penelitian ini membandingkan laporan tahunan bank syariah di Indonesia dengan 15 indikator yang terdapat di dalam Pasal 62 Ayat 2 dan 3 PBI Nomor 11/33/PBI/

2009 dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah teknik yang banyak digunakan dalam ilmu sosial, yang dapat menguji komunikasi tertulis maupun oral secara objektif dan kuantitatif untuk menarik kesimpulan tentang nilai, makna, dan pemahaman yang disampaikan (Riffe *et al.*, 2005).

Menurut Krippendorff (1980), dalam analisis isi ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu reliabilitas dan validitas. Reliabilitas merupakan kemampuan sebuah penelitian untuk memberikan pernyataan yang sama atas data yang sama dalam berbagai proses pengukuran, sementara validitas merupakan kemampuan instrumen dalam mengukur hal yang diinginkan untuk menggambarkan kebenaran (Krippendorff, 1980). Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini, data dalam penelitian ini dimasukkan dua orang peneliti, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pengecekan kembali untuk mengatasi perbedaan yang muncul jika memang ada.

Dikarenakan kurangnya teori tentang pelaporan tata kelola (Chatterjee, 2011) dan jumlah sampel yang terbatas, penelitian ini cenderung bersifat eksploratori (*exploratory research*) dan tidak menggunakan hipotesis. Penelitian ini menggunakan metode daftar (*checklist*). Nilai 1 untuk setiap keberadaan informasi di dalam laporan tahunan yang sesuai dengan indikator yang bersangkutan dan nilai 0 bagi yang tidak. Jika pada suatu indikator terdapat dua atau lebih kriteria, maka setiap kriteria mendapat nilai 1 jika ada, dan 0 jika tidak. Nilai indikator bersangkutan merupakan rata-rata dari setiap kriterianya. Misalkan, untuk indikator ke-6 yang memiliki 4 kriteria, jika suatu bank melaporkan jumlah komisaris, direksi, dan DPS, namun tidak melaporkan remunerasinya, maka nilai indikator ke-6 pada tahun tersebut adalah 0,75. Dengan demikian, nilai maksimum yang dapat diberikan adalah 15 untuk setiap bank setiap tahunnya. Pendekatan serupa telah digunakan beberapa peneliti seperti Chatterjee

(2011), Paino *et al.* (2011), serta Darmadi (2011) dalam meneliti pengungkapan dalam laporan tahunan.

Sampel penelitian ini adalah BUS di Indonesia yang terdaftar di BI. Total terdapat 11 BUS yang terdaftar, yaitu seperti tersaji di Tabel 1.

Tabel 1. Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia

Nama Bank	Singkatan
PT Bank BNI Syariah	BNIS
PT Bank Muamalat Indonesia	BMI
PT Bank Syariah Mandiri	BSM
PT Bank Syariah Mega Indonesia	BSMI
PT Bank BCA Syariah	BCAS
PT Bank BRI Syariah	BRIS
PT Bank Jabar Banten Syariah	BJBS
PT Bank Panin Syariah	BPS
PT Bank Syariah Bukopin	BSB
PT Bank Victoria Syariah	BVS
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	BMSI

Sumber: Bank Indonesia, 2013

Dalam penelitian ini data diambil dari laporan tahunan 2010 hingga 2012 masing-masing bank yang tersedia di website masing-masing bank. Tahun 2010 dan setelahnya dipilih sesuai dengan masa berlaku PBI Nomor 11/33/PBI/2009 yang dimulai sejak 1 Januari 2010. Penelitian ini menggunakan data sampai 2012 karena pada saat penelitian ini dilakukan data yang tersedia hanya sampai tahun 2012. Bagian *corporate governance* akan dijadikan fokus, karena dirasa cukup untuk memahami cakupan tata kelola dari manajer (Chatterjee, 2011).

Terdapat berbagai cara yang mungkin diambil oleh bank syariah dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat (Paino *et al.*, 2011). Meski demikian, laporan tahunan dianggap sebagai sumber informasi perusahaan yang terpenting (Botosan, 1997). Selain itu, perusahaan yang memiliki pengungkapan yang berkualitas akan mencantumkan informasi penting di dalam laporan tahunannya (O'Sullivan *et al.*, 2008).

Analisis Pengungkapan Tata Kelola Bank Syariah di Indonesia

Cahyo Luthfi Adiono & Mahfud Sholihin

Dari kesebelas bank yang telah disebutkan, dipilih sembilan bank syariah yang laporan tahunannya tersedia di website masing-masing, yaitu BNI Syariah, Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, BCA Syariah, BRI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan Bank Victoria Syariah. Bank Jabar Banten Syariah dikeluarkan dari sampel akibat laporan tahunan tahun 2011 tidak didapatkan, sementara Maybank Syariah Indonesia baru berdiri pada tanggal 11 Oktober 2010, sehingga tidak menerbitkan laporan tahunan untuk tahun tersebut.

Seperti yang tersaji di dalam Tabel 2, Bank Syariah Mandiri memiliki nilai tertinggi, yakni 100% atau maksimal, diikuti dengan Bank BCA Syariah (93%), dan Bank Muamalat Indonesia (89%). Sementara itu, Bank Victoria Syariah memiliki nilai terendah yakni 23%, diikuti Bank Panin Syariah (45%). Tabel 2 juga menunjukkan bahwa hanya 3 bank atau 33%, yang memiliki nilai pengungkapan di atas 75%. Dua bank atau sebanyak 11% berada pada kisaran 50%-75%, sementara sisanya 4 bank, berada di bawah 50%.

HASIL

Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri, Bank BCA Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia memiliki nilai pengungkapan tertinggi di antara 9 Bank Syariah yang diteliti.

Pertumbuhan Pengungkapan Tata Kelola per Tahun

Pertumbuhan serta nilai pengungkapan per tahun masing-masing bank terangkum di dalam Tabel 3. Dapat dilihat bahwa Syariah Bukopin memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi

Tabel 2. Nilai Rata-Rata Pengungkapan Bank dan Indikator

No.	Indikator dalam PBI Nomor 11/33/PBI/2009	BNIS		BMI		BSM		BSMI		BCAS		BRIS		BPS		BSB		BVS		Rerata Setiap Indikator
		(2010-2012)	(2010-2012)	(2010-2012)	(2010-2012)	(2010-2012)	(2010-2012)	(2010-2012)	(2010-2012)	(2010-2012)	(2010-2012)	(2010-2012)	(2010-2012)	(2010-2012)	(2010-2012)	(2010-2012)	(2010-2012)	(2010-2012)		
1	Kesimpulan Umum <i>Self Assesment</i>	1.00 (1)	1.00 (1)	1.00 (1)	0.00 (8)	1.00 (1)	1.00 (1)	1.00 (1)	0.33 (7)	0.00 (8)	70%									
2	Independensi Dewan Komisaris	0.78 (5)	1.00 (1)	1.00 (1)	0.89 (4)	1.00 (1)	0.33 (7)	0.33 (7)	0.78 (5)	0.22 (9)	70%									
3	Independensi Dewan Direksi	0.33 (6)	0.67 (5)	1.00 (1)	1.00 (1)	1.00 (1)	0.33 (6)	0.17 (8)	1.00 (1)	0.17 (8)	63%									
4	Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah	0.67 (6)	1.00 (1)	1.00 (1)	0.67 (6)	1.00 (1)	1.00 (1)	0.33 (8)	1.00 (1)	0.00 (9)	74%									
5	Daftar Konsultan, Penasihat, atau yang Dapat Dipersamakan	0.00 (3)	0.00 (3)	1.00 (1)	0.00 (3)	0.33 (2)	0.00 (3)	0.00 (3)	0.33 (2)	0.00 (3)	19%									
6	Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain	1.00 (1)	1.00 (1)	1.00 (1)	0.75 (8)	1.00 (1)	0.92 (5)	0.92 (5)	0.83 (7)	0.75 (8)	91%									
7	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	1.00 (1)	1.00 (1)	1.00 (1)	0.00 (4)	1.00 (1)	0.00 (4)	0.00 (4)	0.00 (4)	0.00 (4)	44%									
8	Frekuensi Rapat Komisaris	1.00 (1)	1.00 (1)	1.00 (1)	0.67 (7)	1.00 (1)	1.00 (1)	0.67 (7)	1.00 (1)	0.67 (7)	89%									
9	Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah	1.00 (1)	1.00 (1)	1.00 (1)	0.67 (6)	1.00 (1)	1.00 (1)	0.33 (8)	0.67 (6)	0.33 (8)	78%									
10	Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>)	0.67 (4)	1.00 (1)	1.00 (1)	0.33 (6)	1.00 (1)	0.00 (7)	0.67 (4)	0.00 (7)	0.00 (7)	52%									
11	Jumlah Permasalahan Hukum	1.00 (1)	1.00 (1)	1.00 (1)	0.00 (7)	1.00 (1)	0.00 (7)	1.00 (1)	0.67 (6)	0.00 (7)	63%									
12	Transaksi dengan Benturan Kepentingan	1.00 (1)	1.00 (1)	1.00 (1)	0.67 (5)	1.00 (1)	0.67 (5)	0.67 (5)	0.67 (5)	0.00 (9)	74%									
13	<i>Buy Back Shares</i> / Obligasi	0.00 (5)	1.00 (1)	1.00 (1)	0.00 (5)	1.00 (1)	0.00 (5)	0.00 (5)	0.67 (4)	0.00 (5)	41%									
14	Dana Kegiatan Sosial	1.00 (1)	1.00 (1)	1.00 (1)	1.00 (1)	1.00 (1)	0.67 (7)	0.33 (8)	0.33 (8)	1.00 (1)	81%									
15	Pendapatan Non-Halal	0.67 (2)	0.67 (2)	1.00 (1)	0.67 (2)	0.67 (2)	0.00 (9)	0.33 (6)	0.33 (6)	0.33 (6)	52%									
Peringkat Pengungkapan Tata Kelola 3 Tahun Terakhir		74% (4)	89% (3)	100% (1)	49% (6)	93% (2)	46% (7)	45% (8)	57% (5)	23% (9)										

dibandingkan tujuh bank lainnya, yakni sebesar 18% per tahun. Panin Syariah memiliki rata-rata pertumbuhan terendah, yaitu sebesar -14%. Hanya terdapat empat bank yang tingkat pertumbuhannya di atas 5%. Satu bank, yaitu Syariah Mandiri, telah mencapai tingkat pengungkapan maksimum dalam tiga tahun yang diteliti.

Dalam tabel yang sama dapat pula dilihat perubahan peringkat pengungkapan setiap tahunnya. Pada 2010, nilai pengungkapan yang tertinggi dimiliki oleh BCA Syariah dan Syariah Mandiri. Namun, pada 2011 dan 2012 peringkat pertama hanya diduduki oleh Syariah Mandiri dengan nilai sempurna, sementara nilai pengungkapan BCA Syariah justru menurun. Peringkat terendah dalam tiga tahun terakhir diduduki oleh Victoria Syariah.

Pada tahun 2011, Syariah Mega memiliki pertumbuhan terbesar dari tahun 2010, yaitu sebesar 22%, diikuti oleh Muamalat dan Victoria Syariah (13%). Untuk pertumbuhan dari tahun 2011 ke 2012, Syariah Bukopin adalah yang tertinggi,

dengan pertumbuhan sebesar 33%. Terdapat dua bank yang mengalami penurunan nilai pengungkapan baik pada 2011 maupun 2012. Kedua bank itu adalah Panin Syariah dan BCA Syariah.

PEMBAHASAN

Pada indikator *self assessment*, sebanyak enam dari sembilan bank (66%) telah mengungkapkannya di dalam laporan keuangan selama tiga tahun terakhir, sementara satu bank (Bank Syariah Bukopin) baru mengungkapkannya pada tahun 2012. Tingkat pengungkapan cenderung beragam, dari hanya memberikan kesimpulan umum tentang *self assessment* (contohnya pada laporan BNI Syariah 2012 dan Syariah Bukopin 2012) hingga penilaian secara rinci pada 11 faktor yang disebutkan oleh BI dalam Surat Edaran No. 12/13/DPbS. Sementara itu, dua bank syariah, yaitu Bank Syariah Mega dan Bank Victoria Syariah, tidak mencantumkan hasil *self assessment* selama tiga tahun terakhir.

Tabel 3. Pertumbuhan Pengungkapan Bank

Kode Bank	Nilai Pengungkapan			Pertumbuhan per Tahun		Rata-Rata Pertumbuhan
	2010	2011	2012	2010-2011	2011-2012	
BNIS	80% (3)	68% (4)	74% (5)	-12% (8)	7% (2)	3% (7)
BMI	80% (3)	93% (2)	93% (2)	13% (2)	0% (4)	7% (4)
BSM	100% (1)	100% (1)	100% (1)	0% (6)	0% (4)	0% (5)
BSMI	36% (8)	58% (5)	52% (7)	22% (1)	-7% (6)	8% (2)
BCAS	100% (1)	93% (2)	87% (3)	-7% (7)	-7% (6)	-7% (8)
BRIS	38% (7)	47% (6)	53% (6)	8% (3)	7% (2)	8% (2)
BPS	61% (5)	41% (8)	33% (8)	-19% (9)	-8% (8)	-14% (9)
BSB	45% (6)	47% (6)	80% (4)	2% (5)	33% (1)	18% (1)
BVS	18% (9)	32% (9)	19% (9)	13% (2)	-12% (9)	1% (6)
Rata-Rata BUS	62%	64%	66%	2%	1%	2%

Analisis Pengungkapan Tata Kelola Bank Syariah di Indonesia

Cahyo Luthfi Adiono & Mahfud Sholihin

Dalam hal independensi dewan komisaris, terdapat empat bank telah mengungkapkannya secara penuh dalam tiga tahun terakhir, yakni Bank Syariah Mandiri, BCA Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Bukopin. Nilai terendah pada indikator ini adalah 0,22 yang dimiliki Bank Victoria Syariah.

Untuk pengungkapan independensi dewan direksi, lima bank (Bank Syariah Mandiri, Bank BCA Syariah, Bank Syariah Mega, dan Bank Syariah

Bukopin) memiliki nilai maksimal yang menandakan kelimanya selalu mengungkapkan independensi direksinya secara penuh selama tiga tahun terakhir. Sementara nilai terendah (0,17) adalah Bank Panin Syariah dan Bank Victoria Syariah. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata pengungkapan independensi dewan direksi lebih rendah dibandingkan independensi dewan komisaris, yaitu 63% berbanding 70%.

Tabel 4. Pertumbuhan Pengungkapan Indikator

Indikator dalam PBI No. 11/33/PBI/2009	Rerata Pengungkapan per Tahun			Pertumbuhan per Tahun		Rata-Rata Pertumbuhan
	2010	2011	2012	2010-2011	2011-2012	
Kesimpulan Umum	0,67	0,67	0,78	0%	11%	6%
Self Assesment	(6)	(7)	(5)	(7)	(2)	(3)
Independensi Dewan Komisaris	0,67 (6)	0,63 (10)	0,81 (4)	-4% (13)	19% (1)	7% (2)
Independensi Dewan Direksi	0,44 (12)	0,67 (7)	0,78 (5)	22% (1)	11% (2)	17% (1)
Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah	0,67 (6)	0,78 (4)	0,78 (5)	11% (2)	0% (7)	6% (3)
Daftar Konsultan, Penasihat, atau yang Dapat Dipersamakan	0,22 (15)	0,11 (15)	0,22 (15)	-11% (14)	11% (2)	0% (9)
Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain	0,86 (2)	0,92 (1)	0,94 (1)	6% (6)	3% (8)	4% (8)
Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	0,44 (12)	0,44 (12)	0,44 (11)	0% (7)	0% (7)	0% (9)
Frekuensi Rapat Komisaris	0,89 (1)	0,89 (2)	0,89 (2)	0% (7)	0% (7)	0% (9)
Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah	0,78 (3)	0,78 (4)	0,78 (5)	0% (7)	0% (7)	0% (9)
Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud)	0,67 (6)	0,44 (12)	0,44 (11)	-22% (15)	0% (7)	-11% (14)
Jumlah Permasalahan Hukum	0,56 (10)	0,67 (7)	0,67 (9)	11% (2)	0% (7)	6% (3)
Transaksi dengan Benturan Kepentingan Buy Back Shares/ Obligasi	0,78 (3)	0,89 (2)	0,56 (10)	11% (2)	-33% (15)	-11% (14)
Dana Kegiatan Sosial	0,33 (14)	0,44 (12)	0,44 (11)	11% (2)	0% (7)	6% (3)
Pendapatan Non- Halal	0,78 (3)	0,78 (4)	0,89 (2)	0% (7)	11% (2)	6% (3)
	0,56 (10)	0,56 (11)	0,44 (11)	0% (7)	-11% (14)	-6% (13)

Sebanyak lima bank syariah selalu mengungkapkan rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah-nya (DPS). Tingkat pengungkapan pun beragam, dari hanya menyatakan telah memenuhi undang-undang yang berlaku seperti pada laporan BRI Syariah 2010 dan 2011, hingga terperinci dengan mengungkapkan organisasi lain tempat DPS menjabat, seperti laporan BRI Syariah 2012. Bank Victoria Syariah memiliki nilai terendah dengan tidak mengungkapkan indikator ini pada tiga tahun terakhir.

Pada indikator daftar konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan, hanya satu bank yang memberikan sebagian atau seluruh daftar konsultannya, yaitu Bank Syariah Mandiri. Meski demikian, dalam ketiga tahun tersebut daftar tidak ditemukan dalam bagian tata kelola perusahaan. Terdapat enam bank yang dalam tiga tahun terakhir daftar konsultan atau sejenisnya tidak ditemukan oleh peneliti. Rata-rata pengungkapan indikator ini pun hanya 19%, atau yang terendah di antara 15 indikator yang disarankan oleh BI.

Jika indikator daftar konsultan memiliki nilai rata-rata terendah, maka nilai rata-rata kebijakan remunerasi dan fasilitas lain adalah yang tertinggi (91%). Pengungkapan jumlah komisaris, direksi, dan DPS berpengaruh signifikan terhadap tingginya nilai indikator ini, karena informasi tersebut ditemukan pada seluruh 27 laporan keuangan yang diteliti, baik di dalam bagian tata kelola perusahaan maupun bagian lainnya. Meski demikian, hanya empat bank (44%) yang selalu mengungkapkan jumlah gaji dan remunerasi lainnya selama tiga tahun terakhir, yaitu BNI Syariah, Muamalat, Syariah Mandiri, dan BCA Syariah. Peneliti sama sekali tidak menemukan pengungkapan jumlah gaji dan lainnya pada dua bank, yaitu Syariah Mega dan Victoria Syariah untuk periode yang sama.

Ketimpangan nampak pada indikator rasio gaji tertinggi dan terendah. Seperti yang nampak pada Tabel 2, empat bank (44%) yang selalu mengungkapkan jumlah gaji dan remunerasi lainnya juga

melaporkan rasio gajinya selama tiga tahun terakhir. Sebaliknya, pengungkapan pada indikator ini sama sekali tidak ditemukan pada lima bank lainnya (56%).

Dalam hal frekuensi rapat, ditemukan bahwa tingkat pengungkapan frekuensi rapat dewan komisaris lebih tinggi dibandingkan rapat DPS. Frekuensi rapat komisaris memiliki rerata sebesar 89% atau terbesar kedua di antara 15 indikator yang diteliti, sementara frekuensi rapat DPS sedikit lebih rendah, yakni 78%. Jumlah BUS yang selalu mengungkapkan frekuensi rapat komisaris dalam tiga tahun terakhir pun lebih tinggi, yaitu sebanyak 6 bank berbanding 5 bank yang selalu mengungkapkan frekuensi rapat DPS.

Tingkat pengungkapan jumlah penyimpangan (*internal fraud*) mendapatkan rata-rata 52%. Dari rata-rata tersebut, hanya tiga bank dengan nilai pengungkapan tertinggi yang selalu mengungkapkan indikator ini, yaitu Muamalat, Syariah Mandiri, dan BCA Syariah. Terdapat tiga bank yang pengungkapan *internal fraud*nya tidak ditemukan dalam periode yang diteliti, yaitu BRI Syariah, Syariah Bukopin, dan Victoria Syariah.

Ketimpangan kembali muncul pada indikator jumlah masalah hukum. Sebanyak lima bank (56%) selalu mengungkapkan masalah hukum yang dialaminya. Beberapa di antara kelima bank tersebut bersedia memberikan rincian tentang perkara yang dihadapi, seperti yang ditemukan pada laporan tahunan Syariah Mandiri tahun 2010 dan 2011. Tiga BUS tidak mengungkapkan jumlah kasus hukum pada ketiga laporan tahunannya, sementara satu bank, yaitu Syariah Bukopin, baru mulai mengungkapkannya pada tahun 2011.

Tingkat pengungkapan yang cukup tinggi terlihat pada indikator transaksi dengan benturan kepentingan. Dari rerata 74%, sebanyak empat bank atau 44% selalu mengungkapkannya, sementara empat bank (44%) mengungkapkan pada dua tahun yang diteliti, dan satu bank yaitu Victoria Syariah, tidak ditemukan pengungkapannya.

Analisis Pengungkapan Tata Kelola Bank Syariah di Indonesia

Cahyo Luthfi Adiono & Mahfud Sholihin

Sebaliknya, tingkat pengungkapan untuk *buy back shares* atau obligasi cenderung rendah, dengan rata-rata 41% atau kedua terendah. Hanya tiga dari sembilan BUS (33%) yang selalu mengungkapkannya, yakni Muamalat, Syariah Mandiri, dan BCA Syariah, sementara empat bank (44%) sama sekali tidak mengungkapkannya. Satu bank yang tersisa, yaitu Syariah Bukopin, baru mengungkapkan mulai tahun 2011. Patut diperhatikan pula bahwa dari sebelas laporan keuangan yang mengandung pengungkapan ini, tidak satu pun yang menyebutkan telah melakukan *buy back shares* atau obligasi.

Dalam kaitannya dengan dana sosial, terdapat enam bank, atau 66%, yang mengungkapkan jumlah dan penerimanya dalam tiga tahun terakhir, sementara satu bank hanya pada dua tahun dan dua bank pada satu tahun yang diteliti. Patut diperhatikan bahwa dari 22 laporan tahunan yang mengandung informasi dana sosial, hanya enam di antaranya yang mengungkapkan di seksi tata kelola perusahaan, sementara sisanya mengungkapkan informasi tersebut di seksi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau bagian lain di laporan tahunan.

Pada indikator terakhir, yaitu pendapatan non-halal dan penggunaannya, hanya terdapat satu bank yang selalu melaporkan dalam tiga tahun terakhir, yaitu Syariah Mandiri. Empat bank lainnya, yakni BNI Syariah, Muamalat, Syariah Mega, dan BCA Syariah, mengungkapkannya pada dua tahun yang diteliti. Hanya satu bank yang pengungkapannya tidak peneliti temukan dalam tiga tahun terakhir, yaitu BRI Syariah.

Secara keseluruhan, pengungkapan tata kelola BUS di Indonesia tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Rata-rata pertumbuhan pengungkapan tata kelola adalah 2% selama dua tahun terakhir, dengan rincian 2% pada 2010-2011 dan 1% pada 2011-2012. Nilai rata-rata pengungkapan pada tahun 2012 pun lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,67

berbanding 0,62 pada 2010 dan 0,64 pada 2011.

Pertumbuhan per indikator disajikan pada Tabel 4. Independensi direksi merupakan indikator dengan rata-rata pertumbuhan terbaik dalam dua tahun terakhir, dengan tingkat 17%. Pengungkapan jumlah penyimpangan dan transaksi dengan benturan kepentingan yang rata-rata turun sebesar 11% per tahun merupakan indikator dengan pertumbuhan terendah. Terdapat setidaknya tujuh indikator yang rata-rata pertumbuhannya di atas 5% per tahun.

Pertumbuhan pengungkapan independensi direksi yang sebesar 22% adalah yang tertinggi dari 2010 ke 2011. Untuk periode 2011 ke 2012, independensi komisaris yang tumbuh 19% menjadi yang tertinggi. Sementara itu, indikator yang mengalami penurunan tertinggi dari 2010 ke 2011 adalah jumlah penyimpangan, dengan tingkat 22%. Untuk periode 2011 ke 2012, posisi tersebut diduduki transaksi dengan benturan kepentingan dengan tingkat penurunan 33%.

Dalam tabel yang sama, tercantum pula perubahan peringkat indikator tiap tahunnya. Pada 2010, indikator rapat komisaris adalah yang tertinggi. Namun, pada 2011 dan 2012, posisinya digantikan oleh indikator kebijakan remunerasi. Tingkat pengungkapan daftar konsultan menjadi yang terendah dalam tiga tahun terakhir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat pengungkapan tata kelola pada laporan tahunan BUS yang ada di Indonesia pada tahun 2010-2012 dengan indikator yang disebutkan dalam PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dengan metode *content analysis*.

Dari sembilan BUS yang diteliti, Bank Syariah Mandiri, Bank BCA Syariah, dan Bank Muamalat memiliki nilai pengungkapan yang tertinggi, sementara Bank Syariah Bukopin memiliki rata-rata

pertumbuhan tertinggi. Akan tetapi, hanya empat BUS yang memiliki nilai pengungkapan di atas 70% dan empat BUS yang tingkat pertumbuhan per tahunnya di atas 5%. Dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, tingkat pengungkapan tata kelola sebagian BUS dalam laporan tahunan tidaklah tinggi dan belum mengalami pertumbuhan yang berarti.

Dilihat dari rerata indikator yang terdapat dalam PBI, informasi tentang kebijakan remunerasi, frekuensi rapat dewan komisaris, dan dana kegiatan sosial memiliki tingkat pengungkapan yang tinggi. Patut dicermati bahwa nilai pengungkapan informasi kebijakan remunerasi yang tinggi cenderung berasal dari pengungkapan jumlah direksi, komisaris, dan DPS. Sementara itu, tingkat pengungkapan daftar konsultan, obligasi, dan rasio gaji tergolong rendah. Independensi dewan direksi adalah indikator yang paling berkembang dengan menjadi satu-satunya indikator yang tumbuh di atas 15% per tahun.

Saran

Melihat tingkat dan pertumbuhan pengungkapan tata kelola dalam laporan tahunan yang masih cenderung rendah, penelitian ini menyarankan bank-bank syariah di Indonesia mulai meningkatkan informasi yang ada di dalamnya. Patut diingat bahwa laporan tahunan adalah medium yang dianggap penting dalam menyampaikan informasi perusahaan (Botosan, 1997) dan menunjukkan apakah pengungkapan perusahaan berkualitas tinggi atau tidak (O'Sullivan *et al.*, 2008).

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. 2009. *FAQ PBI No.11/33/PBI/2009*. http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2D47359C-5738-4A5A-AA8-4714B821827B/18480/FAQPBINo11_33_PBI_2009.pdf. Diakses Tanggal 4 Juli 2013.

- Bank Indonesia. 2011. *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2012*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia. 2012. *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2013*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Botosan, C.A. 1997. Disclosure Level and the Cost of Equity Capital. *The Accounting Review*, 72(3): 323-349.
- Chapra, M.U. & Ahmed, H. 2002. Corporate Governance in Islamic Financial Institutions. *Islamic Development Bank-Islamic Research and Training Institute*, 3(6): 58-180.
- Chatterjee, D. 2011. A Content Analysis Study on Corporate Governance Reporting by Indian Companies. *Corporate Reputation Review*, 14(3): 234-246.
- Darmadi, S. 2011. Corporate Governance Disclosure in the Annual Report: An Exploratory Study on Indonesian Islamic Bank. *Humanomics*, 29(1): 4-23.
- Hamid, A.A., Haniff, M.N., Othman, M.R., & Salin, A.S.A.P. 2011. The Comparison of the Characteristics of the Anglo-Saxon Governance Model and the Islamic Governance of IFIs. *Malaysian Accounting Review*, 10(2): 1-12.
- Haniffa, R. & Hudaib, M. 2007. Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports. *Journal of Business Ethics*, 76(5): 97-116.
- Holder-Webb, L., Cohen, J., Nath, L., & Wood, D. 2008. A Survey of Governance Disclosures among U.S. Firms. *Journal of Business Ethics*, 83(3): 543-563.
- IICG. 2012. *Tata Kelola*. <http://iicg.org/iicg/home.php?type=1&pageno=3>. Diakses Tanggal 4 April 2013.
- Krippendorff, K. 1980. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Larcker, D.F., Richardson, S.A., & Tuna, A.I. 2007. Corporate Governance, Accounting Outcomes, and Organizational Performance. *The Accounting Review*, 82(4): 963-1008.
- MacAulay, K., Dutta, S., Oxner, M., & Hynes, T. 2009. The Impact of a Change in Corporate Governance Regulations on Firms in Canada. *Quarterly Journal of Finance and Accounting*, 48(4): 29-52.
- McKinsey & Company. 2002. *Global Investor Opinion Survey: Key Findings*. <http://www.oecd.org/dataoecd/56/7/1922101.pdf>.

Analisis Pengungkapan Tata Kelola Bank Syariah di Indonesia

Cahyo Luthfi Adiono & Mahfud Sholihin

- OECD. 2004. *OECD Principles of Corporate Governance*.
- O'Sullivan, M., Percy, M., & Stewart, J. 2008. Australian Evidence on Corporate Governance Attributes and Their Association with Forward-looking Information in the Annual Report. *Journal of Management and Governance*, 12(1): 5-35.
- Paino, H., Bahari, A.B., & Bakar, R.A. 2011. Shariah, Social Responsibilities and Corporate Governance of the Islamic Banks in Malaysia. *European Journal of Social Sciences*, 23(3): 382-391.
- Riffe, D., Lacy, S., & Fico, F.G. 2005. *Analyzing Media Messages Using Quantitative Content Analysis in Research*. 2nd Edition. London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Safieddine, A. 2009. Islamic Financial Institutions and Corporate Governance: New Insights for Agency Theory. *Corporate Governance: An International Review*, 17(2): 142-158.
- Satkunasingam, E. & Shanmugam, B. 2004. Disclosure and Governance of Islamic Banks - A Case Study of Malaysia. *Journal of International Banking Regulation*, 6(1): 69-81.
- Widiyanti, M., Jusoh, M., Tahir, Md.Z.Md., & Ismail, A.G. 2011. A Comparative Analysis of Corporate Governance in Indonesia and OECD. *Prosiding Perkem VI*, 1(1): 46-60.